

## POTRET KEBANGSAAN GENERASI MUDA DI KOTA JAYAPURA

*Muh. Irfan Syuhudi*

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar

Jalan AP. Pettarani No. 72 Makassar

Email: irfansyuhudi@gmail.com

### Abstrak

Sebagian besar generasi muda atau generasi milenial di Jayapura masih terasa asing dengan konsep nasionalisme. Meski begitu, mereka umumnya memiliki perasaan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dibuktikan dengan menggunakan produk-produk Indonesia, menghormati simbol-simbol negara, dan menolak segala tindakan yang menentang pemerintahan Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sejauhmana generasi muda di Jayapura memiliki perasaan nasionalisme, dan memaknai nasionalisme. Tentunya, pertanyaan ini dikaitkan dengan pengetahuan mereka mengenai empat konsensus bernegara kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan. Temuan penelitian ini pun menggembirakan. Generasi muda di Jayapura, ternyata bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Meski begitu, mereka berharap pemerintah lebih serius lagi meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi dengan orang non Papua.

**Kata Kunci:** konsensus bernegara, generasi muda, generasi milenial, Jayapura

### PENDAHULUAN

Pada Minggu pagi di tahun 2018, beberapa anak muda yang tergabung di dalam Orang Muda Katolik (OMK), mengadakan misa di sebuah hotel, di Kota Jayapura. Mereka melaksanakan di salah satu ruangan di lantai satu dekat lobi. Melihat dari wajah-wajah yang hadir, tidak semua anak muda yang mengikuti kegiatan rohani adalah Orang Asli Papua (OAP). Beberapa di antaranya mengaku orang Toraja, Nusa Tenggara Timur, dan Ambon. Sebelum memulai kegiatan, mereka terlebih dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak jauh dari ruangan tersebut, yang juga di lantai satu, saya sementara sarapan bersama beberapa tamu hotel. Saya mendengar suara mereka begitu bersemangat menyanyikan lagu yang diciptakan W.R. Soepratman itu. Setelah acara selesai, saya mengobrol dengan beberapa jemaat. Karena penasaran,

saya lalu menanyakan mengapa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada kegiatan keagamaan? Menurut mereka, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan keagamaan, sudah dilakukan sejak dulu. Bukan kegiatan keagamaan saja, tetapi juga kegiatan organisasi sosial. Apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap tanah air.

Ilustrasi di atas merupakan salah satu penggambaran bagaimana generasi muda di Kota Jayapura mengisi dan menjejaki pengetahuan mereka tentang kebangsaan. Sebenarnya, bukan anak muda Katolik saja yang memulai kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak muda lain, yang terhimpun di dalam organisasi kemahasiswaan maupun organisasi sosial kepemudaan di Jayapura,

juga melakukan hal serupa.

Rasa nasionalisme orang-orang Papua, kerap kali mengundang pertanyaan beberapa pihak. Masih ada yang meragukan jiwa nasionalisme bertumbuh di kalangan generasi mudanya. Selalu saja ada yang mengaitkan dengan masa silam, terutama sejak integrasi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Agustus 1969. Masih saja selalu ada sekelompok orang yang menghendaki Papua Merdeka, atau ingin berpisah dari Indonesia. Buktinya, meski terdengar hanya sayup-sayup, wacana Papua Merdeka acap kali terdengar di beberapa kabupaten setiap tahun.

Di Kota Jayapura, teriakan Papua Merdeka nyaris tidak terdengar. Boleh dikata, kurang mendapat sambutan. Ini ditunjukkan dengan temuan Muhammad Irfan Syuhudi, yang meneliti “Integritas Kebangsaan Generasi Muda di Jayapura” pada 2018. Temuan ini secara umum memperlihatkan integritas kebangsaan generasi muda di Jayapura tergolong tinggi, atau “Sangat Baik”. Indeks integritas tersebut meliputi variabel Integritas pada NKRI, 3,33 (Sangat Tinggi), Integritas pada Pancasila, UUD 1945, dan simbol-simbol negara, 3,33 (Sangat Tinggi), serta Integritas pada Kebhinekaan, 33,4 (Sangat Tinggi).

Pemerintah Papua, khususnya lagi Jayapura, menyadari betul nasionalisme di kalangan anak muda di daerah mereka mengalami pasang-surut. Ia bisa saja positif, bisa pula negatif. Meski begitu, generasi muda yang hidup di masa sekarang atau generasi milenial, tentu saja tidak mengalami apa yang dirasakan orang-orang tua dulu, terutama pada peristiwa Pepera. Karena itu, pemerintah merasa berkewajiban menanamkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada generasi muda Jayapura. Bahkan, pemerintah sampai saat ini tak

pernah mengenal kata lelah. Pengenalan terhadap nilai-nilai nasionalisme menyangkut empat konsensus bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan), sudah ditanamkan sejak dini. Salah satu contoh dilakukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini Yonif Raider 323/BP Kostrad saat melakukan upacara sekaligus Penyuluhan Wawasan Kebangsaan di SMP Satu Atap Camp 19 Distrik Jair Kabupaten Bovendigoel pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 23 Mei 2018 (<http://www.kodam17cenderawasih-tniad.mil.id/2018/05/23/pentingnya-wawasan-kebangsaan-bagi-generasi-muda-2/>, diakses pada 29 Juli 2018).

Penanaman ideologi kebangsaan oleh pemerintah yang terstruktur, tentu saja dipandang tepat. Antonio Gramsci bahkan membenarkan upaya sistematis pemerintah itu. Filosof asal Italia itu menyatakan, penyuluhan mengenai kebangsaan atau sosialisasi terkait kebangsaan, adalah salah satu upaya negara untuk menanamkan ideologi terhadap masyarakat sipil. Secara sosiologis, praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai ritus-ritus nasionalisme untuk menggalang solidaritas suatu kelompok, menjaga integrasi sosial, sekaligus upaya penanaman pengetahuan masyarakat tentang Indonesia dalam konsepsi politik, yaitu NKRI dan simbol-simbolnya (Pamungkas, 2015, 154). Tak hanya negara yang melakukan penanaman ideologi. Sejumlah organisasi, seperti disebutkan di atas, juga melaksanakan hal demikian.

Tulisan ini selesai dibuat Agustus 2018. Artinya, tulisan ini tidak akan mengaitkan dengan peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, pada September 2019. Fokus penelitian ini adalah Kota Jayapura,

khususnya lagi generasi muda, yang bermukim di Jayapura. Penelitian ini akan mendeskripsikan sejauh mana generasi muda Jayapura memiliki perasaan kebangsaan nasional, dan memaknai nasionalisme. Tentunya, pertanyaan itu akan dikaitkan dengan pengetahuan mereka mengenai empat konsensus bernegara, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebhinekaan.

### Generasi Muda dan Generasi Milenial

Konsep generasi muda sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Para ahli memiliki kriteria tersendiri tentang siapa yang disebut generasi muda. Meski begitu, semua sepakat, generasi muda terkait erat dengan tahun kelahiran. Pada posisi ini, para ahli kembali berbeda pendapat, atau tidak ada kesepakatan tunggal, mengenai batasan atas dan bawah terhadap kelompok generasi ini. Namun, ada yang menyebut, generasi ini bermula dari periode akhir 1970-an hingga mereka yang lahir pertengahan 1990-an. William Strauss dan Neil Howe (2000), menyebutkan, generasi muda adalah mereka yang lahir pada 1982 sampai 2004. Ada juga ahli menyatakan, generasi muda lahir antara 1980-an hingga 1990-an, yang disebut juga generasi milenial (Nadzir, 2018:1).

Kajian demografi di Amerika Serikat sebenarnya telah lama tertarik meneliti perbedaan yang terjadi pada setiap lintas generasi. Bagi Amerika Serikat, pemahaman lintas generasi dianggap penting untuk mencermati pembuatan keputusan politik dan bisnis. Salah satu contoh yang melakukan penelitian generasi milenial di Amerika Serikat adalah *Pew Research* tentang “Millennials: A Portrait of Generation Next” (2010). Lembaga ini kemudian memetakan generasi milenial Amerika Serikat sebagai kelompok

independen berkaitan politik dan pekerjaan. Generasi milenial di sana juga terlihat liberal dalam mengekspresikan kebebasan individual, sehingga ikut memengaruhi cara pandang mereka terhadap negara. Misalnya, tak ingin terikat pada simbol-simbol lama nasionalisme, seperti bendera, patriotisme, dan lagu kebangsaan (<http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/3/2010/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2019).

Generasi muda kerap pula diidentikkan dengan status sosial yang mereka sandang, serta di mana mereka bermukim saat itu. Dalam pandangan *Alvara Institute*, generasi muda umumnya cenderung tinggal di perkotaan, dan masuk kategori kelas menengah. Mereka ditandai dengan tiga karakteristik, yaitu *connected*, *creative*, dan *confidence* (Nadzir, 2018:2). Generasi milenial disebut juga generasi Y dan generasi Net, yang dicirikan antara lain, masing-masing individu berbeda (tergantung di mana mereka dibesarkan), strata ekonomi-sosial keluarganya, pola komunikasi terbuka, terbuka terhadap pandangan ekonomi dan politik, pengguna media sosial fanatik, serta memiliki perhatian lebih terhadap kekayaan. Kehidupan keseharian generasi milenial juga tergantung pada dunia maya, dan mengandalkan teknologi internet, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, dan sebagainya. Kehadiran teknologi komunikasi yang mendominasi kehidupan masyarakat telah menjadi arena utama masyarakat modern untuk mengartikulasikan diri, seperti sarana ekspresi diri, seksual, dan sebagainya (Putra, 2016:125 dan Arymami, 2017:6).

Berbagai macam akses kemudahan ditambah kecanggihan yang diperoleh dari alat teknologi komunikasi, menyebabkan orang-orang terkesan sulit melepaskan diri

dari aktivitas tersebut. Setidaknya, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur, kita sering “berselancar” di dunia maya (Syuhudi, 2019:70). Dalam artikel ini, generasi muda yang dimaksud adalah mereka yang lahir pada 1980 hingga 1990. Generasi ini juga merasakan dampak perkembangan dan kemajuan dunia internet, dan hidup di dalam dunia media sosial.

### **Nasionalisme (di) Papua**

Nasionalisme sendiri dapat diartikan perasaan cinta terhadap bangsa dan negara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme mencakup pula suatu ideologi negara modern, yang dipandang sebagai kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme tidak hanya dianggap sebagai instrumen untuk merekatkan kemajemukan, melainkan juga wadah yang menegaskan kemajemukan identitas Indonesia (Dewi, 2017:9). Konsensus bernegara mencakup pengetahuan berkenaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang juga dikategorikan pengetahuan tentang Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (Noor, 2013:101).

Benedict Anderson (1983, dalam Nadzir, 2018:2-3), menyebutkan, perhelatan Kongres Pemuda II pada 1928 menjadi peristiwa penting dalam persejaraan kepemudaan di Nusantara. Saat itu, baru pertama kalinya ada sekumpulan anak muda berlatarbelakang identitas sosial berbeda mengakui adanya kesamaan yang melampaui batas-batas lama primordial. Namun, sama seperti sosok yang dianggap representasi milenial hari ini, pemuda yang berpartisipasi dalam Kongres Pemuda adalah sekelompok kecil elite masyarakat dan mengenyam pendidikan tinggi. Hanya saja, pemuda saat itu, khususnya di Jawa, dideskripsikan

sebagai kelompok orang-orang patuh. Belakangan, gambaran pemuda mulai berubah. Mereka yang awalnya digambarkan sebagai kelompok yang belajar nilai-nilai kepatuhan, pelan-pelan bertransformasi menjadi kelompok dengan semangat perjuangan yang hendak berjuang mengubah tatanan yang berlaku.

Demikian halnya di Papua. Apa yang dirasakan generasi muda terdahulu (1940-1960-an), jelas tampak berbeda dengan generasi muda yang hidup di zaman milenial. Pemuda Papua yang hidup di masa kolonial, dan masa-masa di mana Papua berintegrasi dengan Indonesia, mengalami gejolak perjuangan yang berbeda dengan kondisi sekarang. Sementara generasi muda sekarang, yang hidupnya berjarak puluhan tahun dengan masa kolonial, mengalami “pembelahan” tentang pengetahuan kesejarahan. Masih ada yang membedakan antara sejarah nasionalisme Papua dengan sejarah nasionalisme Indonesia.

Karena itu, memahami nasionalisme di Papua tak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah mereka. Meskipun hanya fokus di Jayapura, tulisan ini tetap akan menyinggung historitas nasionalisme Papua. Ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana sejarah nasionalisme yang terjadi di Papua. Lagipula, secara geografis, Jayapura termasuk salah satu wilayah Papua, dan menjadi Ibukota Provinsi Papua. Lalu, mengapa nasionalisme penting dibicarakan di Papua? Sebelum menulis panjang lebar, rasa-rasanya kurang elok membincang nasionalisme di Papua tanpa merujuk tulisan Bernarda Meteray. Bagi Meteray, orang Papua diakui terlambat mengenal rasa nasionalisme dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Di saat daerah lain di Indonesia sudah terbebas dari penjajah, orang Papua justru masih berada di bawah cengkeraman

penjajah.

Salah satu tulisan menarik Meteray adalah “Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru”. Ia memaparkan, ada semacam keterlambatan bagi orang Papua menerima gagasan-gagasan nasionalisme dibanding daerah lain. Dosen Universitas Cendrawasih Papua ini menjelaskan, proses pengindonesiaan di Papua dilakukan dengan cepat, serta dengan model “tak lazim”. Misalnya, tanpa melalui pendidikan formal dan tanpa perencanaan matang. Kesadaran keindonesiaan di Papua juga tidak dimulai dari orang-orang Papua sendiri, tetapi melalui “pendatang”, yaitu Soegoro Atmoprasodjo, Gerungan, Sam Ratulangi, Stefanus Joseph, dan Petero Jandi pada 1946-1948. Sejak 1945 hingga 1962, Papua masih di bawah pemerintahan Belanda, dan sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan tengah belum tersentuh gagasan-gagasan nasionalisme (Meteray, 2014:3-4).

Kelemahan yang melatari nasionalisme di Papua sejak 1945 hingga 1962, menurut Meteray adalah: *Pertama*, proses yang berlangsung cepat, tidak terencana, tanpa proses pendidikan, hanya melalui imbauan dan pembentukan partai politik. *Kedua*, ketika tokoh pengagas Indonesia asal Indonesia ditangkap dan kemudian dikembalikan ke luar Papua, pengindonesiaan lebih banyak diperankan oleh orang Papua, dan orang Indonesia lain yang masih mendalami gagasan keindonesiaan. *Ketiga*, penggunaan bahasa Melayu sejak kehadiran gereja dan pemerintah di Papua belum mampu membangkitkan rasa nasionalisme di Papua. *Keempat*, proses gerakan pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui jalur bawah tanah, karena sejak 1945 hingga 1962 masih

di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Meteray, 2014: 3-4).

Richard Chauvel (dalam Asyhari dan Afwan, 2015:3), mengemukakan, terdapat perbedaan antara nasionalisme di Papua dengan daerah lain di Indonesia. Nasionalisme di Papua lahir dari benih yang ditanamkan Belanda, sedangkan benih nasionalisme Indonesia ditanamkan oleh “orang Indonesia” dari orang-orang Indonesia bagian timur. Saat Belanda bercokol di Papua hingga 1962, mereka berhasil menanamkan nasionalisme kepada orang Papua, tetapi menurut (nasionalisme) versi Belanda. Hal inilah yang kemudian menyebabkan corak nasionalisme Papua dengan daerah lain menjadi berbeda. Di samping itu, faktor penyebab munculnya nasionalisme Papua juga terletak pada perjalanan sejarah Papua menyangkut perbedaan dan persaingan antara orang Papua dan orang Indonesia (seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir), baik sebelum perang Pasifik 1942 maupun selama 1944-1962.

Dalam arti yang lebih luas, menanamkan wawasan kebangsaan sebagai upaya untuk memelihara rasa kebangsaan, belum dianggap cukup hanya dengan melakukan doktrinasi terhadap empat konsensus bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Menanamkan dan memelihara kebangsaan mesti juga disertai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Maka, dalam konteks Jayapura, apa yang dikatakan Ben Anderson, dalam bukunya, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Sphere of Nationalism* (1991), bahwa nasionalisme seringkali tidak menemukan relevansinya, dan gagal dimaknai oleh masyarakat yang membayangkannya ketika dihadapkan dalam konteks ekonomi, politik, sosial, dan budaya,

adalah benar. Bila keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran belum terpenuhi secara merata, nasionalisme hanyalah komunitas politik yang dibayangkan (Pamungkas, 2015:149).

Nasionalisme dalam konteks di Jayapura juga dimaknai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah mereka. Ia tidak hanya persoalan pengetahuan tentang empat konsensus bernegara. Dalam kaitan integritas kebangsaan, orang Papua juga menghendaki pemerataan di sektor pembangunan seperti halnya daerah lain di Indonesia, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Geografis dan Demografis Jayapura

Kota Jayapura memiliki lima distrik atau kecamatan, yaitu Muara Tami, Abepura,

Heram, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Dari lima distrik tersebut, Muara Tami merupakan distrik terluas, yaitu mencapai 626,7 Km<sup>2</sup>, sedangkan terkecil adalah Distrik Jayapura Selatan, yaitu 43,4 Km<sup>2</sup>. Muara Tami dikenal sebagai daerah perbatasan, karena lokasinya bersebelahan dengan negara Papua Nugini.

Secara keseluruhan, penduduk di Jayapura berjumlah 288.786 jiwa. Abepura merupakan distrik yang paling banyak penduduknya, yaitu 82.090 jiwa, disusul Jayapura Selatan (75.534 jiwa), Jayapura Utara (73.258 jiwa), Heram (45.278 jiwa), dan yang paling sedikit penduduknya adalah Muara Tami, 12.626 jiwa (BPS Kota Jayapura, 2017).

Penduduk di Kota Jayapura kebanyakan Kristen, dan kebanyakan orang tempatan. Sementara umat Khonghucu, belum ada di kota ini. Lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

**Tabel 1.**

### Jumlah Penduduk Menurut Distrik Berdasarkan Agama di Kota Jayapura, 2016

No.	Distrik	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Jumlah
1.	Muara Tami	11.419	7.095	3.763	70	10	22.357
2.	Abepura	77.181	81.962	22.260	476	490	182.369
3.	Heram	31.700	52.671	10.225	486	242	95.324
4.	Jayapura Selatan	72.760	68.457	23.010	467	824	165.518
5.	Jayapura Utara	61.020	73.308	25.216	601	805	160.950

*Sumber: Kementerian Agama Kota Jayapura, 2016*

Selain orang asli Papua (OAP), mereka yang beragama Kristen dan bermukim di Jayapura juga berasal dari luar Papua, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka umumnya ke Papua untuk kepentingan ekonomi (mencari pekerjaan) atau pindah tugas. Di antara non OAP itu, ada yang kemudian bekerja di sektor swasta (karyawan perusahaan),

pegawai negeri, dan membuka usaha sendiri (berdagang dan jualan makanan). Demikian pula yang berasal dari agama lain. Mereka mengaku terbang ke Papua disebabkan pekerjaan (pindah tugas) atau mencari pekerjaan.

Berkorelasi dengan penduduk berdasarkan agama, tempat peribadatan yang paling banyak di Jayapura adalah gereja (Protestan), yaitu 301 buah, sedangkan

masjid, menempati urutan kedua, 133 buah. Jumlah tempat peribadatan yang paling

sedikit adalah Pura, enam buah. Selengkapnya, lihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik di Kota Jayapura, 2016**

No.	Distrik	Masjid	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Kopel	Pura	Vihara
1.	Muara Tami	10	37	45	4	1	-	-
2.	Abepura	34	8	72	3	4	3	-
3.	Heram	13	4	54	1	41	1	6
4.	Jayapura Selatan	33	1	59	2	2	1	-
5.	Jayapura Utara	43	10	71	3	4	-	-
Jumlah Total		133	60	301	13	52	5	6

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2016

### **Meneropong Generasi Muda Jayapura dari Beragam Sisi**

Generasi muda dalam artikel ini adalah generasi Y, yaitu mereka yang lahir antara 1982 hingga 2004 (Strauss dan Howe, 2000). Generasi muda “zaman now” ini disebut juga generasi milenial, yang hidup di era teknologi informasi seperti internet. Sama seperti generasi muda di daerah lain, generasi muda Jayapura dalam keseharian juga tak bisa lepas dari internet. Mereka aktif bermain di media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Dari beberapa kali mengobrol dengan mereka, tiga media sosial itu yang diakui paling diakrabi. Mereka bahkan mengaku, “tidak bisa hidup tanpa media sosial dalam sehari.”

Dalam sejarah bangsa-bangsa, eksistensi sebuah negara tak lepas dari peran generasi muda. Kehadiran sejumlah organisasi yang pengurusnya terdiri atas pemuda lintas agama dan etnis, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau *Indonesische Studentbond* pada September 1926, ikut memantik rasa persatuan dan kesatuan kalangan pemuda terhadap tanah air. Puncaknya, pada 27-28 Oktober 1928, anak-anak muda menggelar Kongres Sumpah

Pemuda, yang menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kongres pemuda ini kemudian melahirkan tiga keputusan, yang terkenal dengan “Soempah Pemoeda, tentang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia.

Generasi muda Jayapura cenderung kurang tertarik berorganisasi, baik itu organisasi ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Tulisan Syuhudi mengenai Integritas Kebangsaan Generasi Muda di Jayapura (2018), memaparkan, se usai kuliah, sebagian besar mahasiswa di sejumlah kampus di Jayapura lebih memilih pulang ke rumah, atau berkumpul dengan teman-teman, ketimbang berorganisasi. Dari 240 responden yang diberikan kuisisioner, sebanyak 231 orang (96,3%), ternyata tidak aktif dan terlibat di dalam organisasi kepemudaan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura. Namun, ada juga yang masih aktif dan pernah merasakan menjadi pengurus organisasi kepemudaan, yaitu sebanyak sembilan orang, atau 3,8%. Seperti halnya organisasi kepemudaan, generasi muda Jayapura juga terlihat kurang berminat menekuni organisasi keagamaan. Hampir semua responden, atau sebanyak 228

orang (95%), mengaku tidak pernah masuk organisasi keagamaan.

Organisasi ekstra kurikuler yang populer, yang berafiliasi pada agama tertentu, seperti HMI, PMII, PMKRI, GMKI, belum juga menjadi daya tarik mahasiswa. Meski begitu, tetap saja ada kader-kader organisasi tersebut di setiap kampus, meski gaungnya belum terlalu terdengar. Yulianus, aktivis PMKRI Makassar tahun 1990-an, yang belasan tahun menetap di Jayapura, membenarkan hal tersebut. Yulianus mengakui, mahasiswa di Jayapura kurang berminat bergelut di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Sebagian besar mahasiswa kuliah untuk belajar dan bergaul. Begitu kuliah selesai, mereka kebanyakan langsung pulang ke rumah. Apabila ada waktu kosong di sela-sela kuliah, mereka cenderung mengisi dengan “ngumpul-ngumpul” di suatu tempat, yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan organisasi. Mahasiswa juga kerap menghabiskan waktunya bermain di media sosial.

Minimnya peminat mahasiswa untuk masuk organisasi ekstra kurikuler di Jayapura disebabkan belum adanya keseriusan kaderisasi di kalangan mahasiswa baru (maba). Ketika mahasiswa baru memasuki dunia kampus, tidak terlihat adanya keseriusan para aktivis organisasi merekrut anggota baru. Padahal, bagi aktivis senior di organisasi ekstrakurikuler, momen-momen penerimaan maba kerap kali dijadikan ajang “perebutan” sekaligus perekrutan anggota baru. Tak jarang pula, antarorganisasi terlibat perseteruan untuk merebut simpati calon anggota baru. Di samping itu, sejumlah mahasiswa di Jayapura juga menunjukkan kekurangsuksesannya berorganisasi. Namun, ada juga generasi muda yang punya pengalaman berorganisasi

yang berafiliasi kepada agama yang mereka anut. Misalkan, Orang Muda Katolik, Pemuda Gereja, Rohani Kristen, dan Ikatan Mahasiswa Muslim Cendrawasih. Menurut mereka, aktif di organisasi agama adalah ibadah, karena di dalam organisasi tersebut diajarkan nilai-nilai agama. Di samping itu, ada juga generasi muda Jayapura masuk organisasi daerah (organda), yang menghimpun orang-orang dari daerah sama. Secara emosional, relasi di antara mereka lebih dekat kalau di organda. Di antara mereka, memang ada yang masih bersepuh dan kerabat dekat.

Pergaulan lintas etnis generasi muda di Jayapura tergolong bagus. Saya beberapa kali melihat anak muda Papua (OAP) bergaul akrab dengan “pendatang”. Meski istilah “penduduk lokal” dan “pendatang” sudah banyak yang menentang, istilah seperti ini masih terdengar di Jayapura. Penduduk lokal atau OAP, dikenal dengan sebutan *amber*, sedangkan pendatang disebut *koming*. Di Jayapura, mereka yang bentuk fisiknya tidak mencirikan khas orang Papua (rambut keriting dan berkulit hitam), akan dikatakan sebagai pendatang.

Keakraban OAP dengan pendatang mereka tunjukkan di ruang publik, seperti kampus, mall, dan warung kopi (kafe). Saat berada di jalan raya, saya juga sering melihat OAP dan pendatang berboncengan sepeda motor. Jika melihat jalinan keakraban mereka, tentu saja relasi yang terbangun adalah baik-baik saja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan OAP dan pendatang yang saya temui di Jayapura. Salah satu bentuk relasi yang mungkin terkesan sederhana, tetapi sesungguhnya punya makna mendalam adalah keakraban antara suporter sepakbola PSM Makassar (The Macz Man) dengan suporter Persipura Jayapura. Kalau tim PSM menghadapi Persipura di Jayapura, suporter



Persipura tetap bersikap baik terhadap suporter PSM. Meskipun sama-sama pendukung fanatik timnya, mereka sejauh ini belum pernah terlibat bentrokan antarsuporter. Di Jayapura, suporter PSM diperkirakan berjumlah seribu orang. Di luar sepakbola, mereka tetap menjalin keakraban.

Kota Jayapura juga punya beberapa mall, seperti Mall Abepura, Ramayana, dan Mall Jayapura. Selain itu, kota ini punya juga beberapa tempat yang biasa digunakan oleh anak-anak muda untuk nongkrong, seperti warung kopi. Ketika pulang kantor setiap sore, saya beberapa kali mendapati beberapa Aparatur Sipil Negara berusia sekitar 30-an nongkrong di warung kopi sebelum pulang ke rumah. Mereka biasanya datang bersamaan dari kantor ke warung kopi. Pembicaraan yang mereka bahas beragam, mulai pekerjaan kantor, peristiwa-peristiwa kekinian, hingga olahraga. Sementara anak-anak muda OAP (pelajar dan mahasiswa), mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Untuk ukuran kantong mahasiswa yang mengandalkan uang kiriman orang tua di kampung, warung kopi di Jayapura dianggap mahal. Harga satu gelas kopi Rp 25 ribu hingga 35 ribu. Makanya, pelajar dan mahasiswa jarang terlihat nongkrong di warung kopi. Di mall, mereka biasanya cuma jalan-jalan sekadar “cuci mata”. Mereka jarang nongkrong, apalagi berbelanja.

### **Generasi Muda Jayapura Memaknai Kebangsaan**

Penelitian Syuhudi (2018) soal Integritas Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda di Kota Jayapura, menunjukkan angka 3,3, atau “Sangat Baik”. Dari tiga variabel berkenaan “Integritas pada NKRI”, “Integritas pada Pancasila, UUD 1945, Simbol Negara”, serta “Integritas Kebhinekaan”, semua indeks

variabel memperlihatkan angka “Sangat Tinggi” (3,3). Sama seperti penelitian ini, wawasan kebangsaan generasi muda di Jayapura terkait empat konsensus bernegara (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan), menunjukkan hasil positif. Berikut ini akan dideskripsikan generasi muda memaknai empat konsensus bernegara tersebut.

#### **a. NKRI**

Bentuk kecintaan generasi muda Jayapura terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memiliki perasaan bangga dengan apapun yang berbau Indonesia. Dari wawancara dengan beberapa informan, mereka pun siap “pasang badan” apabila ada kelompok atau oknum-oknum yang ingin mengacaukan NKRI. Generasi muda di Jayapura juga cenderung memihak kepada aparat keamanan untuk menindak tegas orang-orang yang ingin membuat kekacauan, termasuk mendukung pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap organisasi yang bertujuan ingin mengganti bentuk NKRI. Kehadiran organisasi atau kelompok yang ingin mengacaukan NKRI dianggap “benalu”, yang mesti segera disingkirkan. Termasuk, Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang hingga saat ini masih sering terdengar gaungnya.

Secara historis, sekitar 1963 dan 1964, yaitu pada masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, organisasi semacam ini mulai hadir. Dua organisasi gerakan yang terkenal adalah “Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” di Jayapura dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” di Manokwari, yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya terlepas dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia. Dalam perkembangan

selanjutnya, pihak keamanan dan kejaksaan kemudian menyebut segala bentuk organisasi yang resisten dan merongrong pemerintahan yang sah sebagai “Organisasi Papua Merdeka” atau, yang dikenal dengan sebutan OPM. Pada awalnya OPM terdiri atas dua faksi utama, yaitu organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekey, mantan Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura. Gerakan ini mulai muncul di permukaan pada 1970 setelah Penentuan Pemilihan Rakyat (Pepera) selesai. Sebutan OPM pertama kali muncul di Manokwari pada 1964, dan kemudian semakin populer saat terjadi pemberontakan senjata yang dipimpin Permenas Ferry Awom pada 1965 di Manokwari, serta berbagai pemberontakan lainnya di berbagai wilayah di Irian Jaya (Andrianto, 2001:119-121).

Saat penelitian ini selesai Oktober 2018, hampir tidak terdengar lagi suara-suara kelompok anti NKRI di Jayapura. Namun, bukan berarti gerakan kelompok itu sama sekali tidak ada lagi. Beberapa informan mengemukakan, kelompok tersebut masih ada, tetapi gaungnya mulai mengecil. Gerakan mereka juga laten. Kuat dugaan, kelompok ini tersebar di Jayapura, serta kabupaten. Hanya saja, jumlah mereka kini terbilang sedikit, dan dapat dihitung jari. Meski berganti nama, kelompok ini dianggap merupakan sisa-sisa peninggalan OPM, dan disebutkan sebagai “generasi ketiga” OPM.

Saat penelitian berlangsung, ada selebaran yang membuat masyarakat di Jayapura resah. Sejumlah koran lokal cetak, seperti *Cenderwasih Pos*, *Harian Pagi Papua*, serta media online nasional, *detik.com*, memberitakan bakal terjadi sebuah peristiwa berkenaan OPM. Media menulis, kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) akan melakukan orasi di

halaman auditorium Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura, Jayapura, 31 Juli 2018. Surat selebaran tersebut ditandatangani Perdana Menteri Pemerintahan Sementara NRFPB, Yoab Syatfie.

Beruntung, orang-orang di Jayapura, termasuk mahasiswa Uncen, tidak terhasut dengan informasi tersebut. Dosen Antropologi Uncen, Yuliana, sempat terkejut ketika saya mengonfirmasi informasi tersebut. Pada hari itu, Yuliana mengaku berada di kampus sejak pagi hingga sore. Sepanjang hari itu, ia sama sekali tidak mendengar informasi NRFPB. Meskipun begitu, sekitar ratusan aparat kepolisian tetap terlihat berjaga-jaga di areal kampus dan pinggir jalan sekitar kampus, untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.

Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kaway, seperti dikutip koran *Harian Pagi Papua*, halaman 1, Rabu, 1 Agustus 2018, menegaskan tidak sependapat dengan kelompok NRFPB. Menurutnya, Papua adalah bagian integral NKRI. Jika masih ada kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, kelompok tersebut disebutkan hanya berjuang untuk kepentingan mereka, bukan masyarakat Papua. Inilah reaksi Orgenes Kaway, seperti dikutip pada koran *Harian Pagi Papua*:

*“Yang kita (masyarakat Papua) minta dari tahun ke tahun telah pemerintah berikan melalui Otonomi Khusus, penambahan keuangan, dan hari ini diberikan dana Rp 14 triliun untuk membangun Tanah Papua. Masyarakat yang di hutan, pedalaman sudah sejahtera, lalu apalagi?”*

Kendati tidak terjadi apa-apa, gerakan separatistis seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia ibarat bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa saja meledak. Tentu

saja, gerakan seperti ini juga sangat meresahkan masyarakat, yang ingin hidup tenang dan damai di Jayapura. Dengan adanya kelompok seperti ini, ini juga menunjukkan masih ada kelompok yang merasa tidak senang berada di bawah “payung” NKRI, dan mereka melakukan gerakan sembunyi-sembunyi (laten). Hal ini yang mesti selalu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, teriakan “merdeka” acap kali masih diucapkan oleh person-person. Teriakan “merdeka” itu umumnya tidak dimaknai sebagai bentuk resistensi atau keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Teriakan “merdeka” itu semata-mata disebabkan oleh lahirnya perasaan kecewa salah seorang person terhadap sistem yang mereka hadapi. Misalnya, ada orang tua (bapak atau ibu) meneriakan kata “merdeka” di sekolah saat mengetahui anaknya tidak naik kelas atau tidak lulus. Pada saat mereka tidak puas terhadap pelayanan negara, maka kata-kata “merdeka” sering terlontar dari mulut mereka. Akan tetapi, di satu sisi, apabila keinginannya terpenuhi, mereka akan diam-diam saja (Wawancara, Kasubag Tata Usaha Kemenag Kota Jayapura, Lamtumiur Tampubolon, di Jayapura, 2 Juli 2018). Menurut beberapa informan, teriakan “merdeka” itu tidak bisa diabaikan atau dibiarkan begitu saja. Karena itu, ia mesti tetap menjadi perhatian pemerintah dan semua pihak yang mencintai NKRI.

Penelitian LIPI berjudul “Papua Road Map” (Widjojo, 2009) menemukan, konflik di Papua disebabkan empat hal, yang saling berkorelasi sejak awal 1960-an. Keempat hal tersebut adalah, sejarah integrasi dan status politik; kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga asli Papua; kegagalan pembangunan

dalam memihaki, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua; serta marjinalisasi dan efek diskriminatif modernisasi terhadap orang asli Papua. Bila empat hal ini dirunut berdasarkan historis dan politis, benang merah persoalan ini adalah sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, yang dianggap oleh pemimpin oposisi Papua tidak benar dan tidak demokratis. Ini pula yang menyebabkan orang Papua melakukan perlawanan dalam bentuk Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sejak 1965 (Widjojo, 2012:299).

Pasca Orde Baru, sikap dan pandangan sebagian besar orang Papua terhadap pemerintah Indonesia mulai “melunak”. Mereka tidak lagi memandang atau memosisikan pemerintah Indonesia sebagai musuh, dan karenanya, ingin memisahkan diri dari NKRI. Tak bisa dipungkiri, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang memulai mengubah perspektif orang Papua terhadap pemerintah. Untuk mendekati orang Papua, Gusdur melakukan pendekatan kultural, yang diawali pada 2000. Dalam banyak catatan media, Gusdur adalah presiden pertama yang mengakui keidentitasan Papua. Kyai NU ini juga merupakan presiden pertama yang tidak melarang bendera Bintang Kejora dikibarkan di Tanah Papua. Bagi Gusdur, Bintang Kejora dianggap bendera kultural semacam umbul-umbul, dan bukan bendera politik, sehingga tak perlu dirisaukan. Gusdur pula yang mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, serta ikut mendukung masyarakat Papua menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua.

Kebijakan Presiden Joko Widodo, yang dalam empat tahun terakhir ini, membangun bermacam infrastruktur di Papua, juga menjadi salah satu penyebab mengapa

indeks integritas pada NKRI generasi muda di Jayapura memperoleh nilai “Sangat Tinggi”. Bagi responden, pembangunan infrastruktur yang memudahkan akses warga dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Sebelum pembangunan dilaksanakan, beberapa warga yang tinggal di daerah pedalaman dan pesisir merasa terisolir dengan dunia luar. Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Papua. Untuk memudahkan akses dan mobilitas warga Papua dari satu tempat ke tempat lain, pemerintah kemudian membangun jalan Trans Papua, jembatan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara. Persoalan dasar warga Papua di pedalaman dan pesisir, antara lain, adalah masalah ketersediaan dan pemenuhan gizi anak dan balita, perumahan layak sehat dan layak huni, ketersediaan pangan, dan akses mendapatkan pendidikan dan kesehatan berkualitas (dalam, <https://bisnis.tempo.co/read/1078937/jokowi-pembangunan-infrastruktur-buka-isolasi-papua/full&Paging=Otomatis>, diakses pada 23 Agustus 2018).

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sama di seluruh Indonesia, disambut suka cita warga Jayapura. Mereka menilai, kebijakan pemerintah dengan menyamakan harga bensin dianggap memerhatikan masyarakat Papua. Selama ini, harga bensin eceran di Kota Jayapura sempat menyentuh angka Rp 50 ribu per liter. Di daerah pegunungan, harga bensin eceran bisa mencapai Rp 100 ribu per liter. Yang paling merasakan dampak lonjakan harga bensin adalah para nelayan. Mereka terkadang terpaksa tidak turun melaut, disebabkan tidak mampu membeli bensin buat operasional perahunya. Padahal, menjadi nelayan adalah

mata pencaharian utama mereka.

Sementara itu, upaya pemerintah yang tak mengenal lelah menanamkan empat konsensus bernegara terhadap generasi muda di Jayapura, menuai hasil positif. Salah satu yang menyebabkan menguatnya pengetahuan kebangsaan pada generasi muda di Jayapura adalah intensifitas pemerintah, sekolah, dan lembaga keagamaan, yang tak henti-hentinya mensosialisasikan tentang rasa cinta tanah air kepada generasi muda di dalam setiap momen penting, seperti memperingati HUT Kemerdekaan RI, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Pada setiap merayakan momen ini, selain memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyakit sosial (narkoba dan minum-minuman keras), pemerintah setempat (provinsi, kota/kabupaten), TNI/Polri, sekolah, organisasi gereja, juga selalu menyelipkan tema-tema kebangsaan, seperti mengisahkan mengenai perjuangan para pahlawan melawan penjajah.

Dalam konteks Jayapura, sikap nasionalisme tidak hanya melulu dimaknai sebagai bentuk perasaan cinta tanah air terhadap NKRI. Kurang terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dapat berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional (Pamungkas, 2015:152). Meski pemerintah perlahan-lahan memberi perhatian kepada Papua (termasuk Jayapura), terutama perbaikan infrastruktur. Namun, mereka juga memberi catatan mengenai pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kondisi di Jayapura berdasarkan aspek sosial ekonomi masih kalah dibanding daerah lain di Indonesia. Karena itu, mereka mengharapkan ada semacam timbal-balik dari pemerintah untuk mengabdikan impian mereka, seperti memerhatikan pembangunan fisik daerahnya, memperbaiki perekonomian masyarakat agar bisa hidup lebih baik, serta

tidak memandang diskriminatif terhadap etnis Papua.

## **b. Pancasila, UUD 1945, dan Simbol Negara**

Pengetahuan generasi muda Jayapura mengenai Pancasila tergolong bagus. Ketika saya menanyakan apakah mereka menghafal teks Pancasila, mereka kompak menjawab hapal. Begitu pula, sebagian besar dari generasi muda yang saya temui mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, yang salah satu poinnya menyatakan, teks Pancasila merupakan hasil rumusan para pejuang Indonesia yang terdiri atas semua unsur golongan (agama dan etnisitas). Mereka juga mengetahui rumusan hasil Panitia 9 yang diserahkan kepada BPUPKI dan diberi nama Piagam Jakarta, yang mengubah kalimat Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.pia.gam.jakarta>, diakses pada 23 Agustus 2018). Menurut mereka, perubahan sila pertama juga menjadi pertimbangan, penduduk di Indonesia tidak dihuni satu agama (Islam) saja, melainkan terdiri atas beragam agama dan kepercayaan lokal. Masyarakat di Indonesia juga heterogen dan multikultur.

Ketika saya mengajukan pertanyaan apakah Pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak boleh diganti, mereka umumnya menjawab, Pancasila sudah final dan tidak boleh diganti. Bagi mereka, Pancasila sudah tepat sebagai dasar pijakan negara Indonesia, yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Karakteristik pada Lima Sila Pancasila dianggap merepresentasikan bangsa Indonesia. Karena itu, apabila ada organisasi maupun kelompok tertentu

yang ingin mengganti Pancasila, dan mengacaukan NKRI, mereka mendesak aparat untuk melakukan tindakan tegas, termasuk membubarkan organisasi tersebut.

Begitupun saat diajukan pertanyaan apakah UUD 1945 sudah tepat dijadikan sistem hukum dan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, mereka menjawab sudah tepat. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada, serta mengikat penduduk yang berada di wilayah NKRI. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Segala produk hukum harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan UUD 1945.

Bagaimana tanggapan generasi muda terhadap simbol negara, seperti bendera Merah Putih? Sama seperti Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih harus dihormati. Di balik makna bendera itu, terbentang sejarah panjang yang berdarah-darah tentang perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih, generasi muda Jayapura juga mengibarkan bendera pada saat merayakan kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus.

Memang, ada beberapa anak muda OAP yang terkesan kurang peduli terhadap konsensus bernegara ini. Informan saya menyatakan, ideologi tentang Papua Merdeka mungkin sudah mati di kalangan generasi tua. Akan tetapi, ia masih bertumbuh di kalangan anak muda Papua, utamanya mahasiswa asal pegunungan Papua

(Orang Gunung). Di lingkungan tempat tinggal informan saya di Distrik Abepura, ia acap kali mendengar mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa menyanyikan lagu-lagu Papua Merdeka. Mahasiswa ini umumnya aktivis Organisasi Daerah. Pada hari berbeda, saya juga sering melihat beberapa anak muda OAP menelusuri jalan raya, dan salah satu dari mereka, memakai *noken* (tas khas Papua, tapi yang berbahan wol), berlambang Bintang Kejora (bendera OPM). Penggunaan simbol-simbol (bendera Bintang Kejora) di ruang publik menjadi pemandangan biasa, dan sebagian kalangan tidak mengaitkan lagi dengan OPM.

Penggunaan simbol-simbol seperti Bintang Kejora dan nyanyian Papua Merdeka, adalah bagian dari kebanggaan atas identitas ke-Papua-an mereka. Hal ini sama seperti kebanggaan etnis tertentu, yang ditunjukkan dengan menyanyikan lagu-lagu khas daerah mereka. Meski begitu, informan saya mengingatkan, bahwa benih-benih OPM masih tertanam di anak-anak muda Papua. Ada semacam perasaan bangga sebagian anak-anak muda dengan kisah-kisah perjuangan “orang tua” kepada Belanda dan Indonesia. Jumlah pendukung Papua Merdeka mungkin sudah berkurang, tetapi menjadi lebih berkualitas. Mereka juga tak lagi mengajak untuk perang terbuka, melainkan mengubah strategi dengan cara menanamkan doktrinasi kepada anak-anak muda terpelajar Papua, seperti mahasiswa dan dosen. Jadi, ingatan tentang OPM menjadi semacam ingatan sosial bagi kalangan anak-anak muda sekarang. Sebagai bagian dari kisah sejarah sosial mereka, cerita-cerita ini tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja.

### c. Kebhinekaan

Masyarakat di Jayapura termasuk masyarakat multikultur. Hal ini dilihat dengan adanya keragaman etnis dan agama. Selain etnis Papua, seperti Dani, Asmat, Wamena, Biak, dan lain-lain, ada juga (etnis) Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, Batak, Padang, Flores, dan Ambon. Semua etnis ini hidup membaur dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam tiga tahun terakhir (2015-2018), belum pernah terdengar terjadi keributan atau konflik yang mengatasnamakan etnisitas. Lebih tepatnya, belum pernah terjadi orang asli Papua terlibat perkelahian dengan etnis pendatang. Yang sering terjadi pada lima tahun lalu, terutama pasca reformasi, adalah perkelahian antar-suku yang melibatkan sesama orang asli Papua. Keributan-keributan hingga perkelahian pernah juga terjadi di Jayapura. Namun, keributan tersebut adalah persoalan keluarga antara sesama orang Papua.

Kemajemukan masyarakat di Papua tak lepas dari sejarah migrasi, yang dimulai sejak abad XV. Namun, sejarah migrasi terbesar di Papua terjadi pada 1969, setelah Papua resmi menjadi bagian NKRI, termasuk di Kota Jayapura. Pada masa ini, migrasi terjadi disebabkan oleh pemerintah saat itu mengirim banyak sekali pegawai pemerintahan dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa untuk bertugas ke Papua. Selain itu, pada masa Orde Baru, pemerintah juga membuka program transmigrasi ke Papua (Asyhari dan Afwan, 2015:16). Tak pelak, program migrasi ini kemudian menyebabkan terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Tanah Papua pada umumnya, dan Jayapura khususnya. Salah satunya, kehidupan di Jayapura menjadi heterogen dari etnis dan agama. Kebanyakan para migran dalam konteks Jayapura masuk

ke dalam kategori “migran semasa hidup” (*life time migrant*), atau mereka pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya (Munir, 2011:133-153).

Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), generasi muda Jayapura tidak mempersoalkan siapa yang menjadi gubernur, walikota, dan bupati. Mereka tidak memandang jabatan kepala daerah berdasarkan agama yang ia anut, tetapi lebih melihat kepada kemampuan bakal calon mengelola pemerintahan, serta tidak berlaku diskriminatif terhadap agama dan etnis lain. Jabatan Walikota Jayapura sejauh ini selalu dipegang oleh pemeluk Kristen, yang merupakan mayoritas di Jayapura. Untuk periode 2018 - 2022, misalnya, jabatan Wakil Walikota diisi oleh Bugis-Islam. Dalam pilkada, ini merupakan salah satu strategi untuk menarik dukungan suara dari agama lain. Terlebih, jumlah orang Bugis yang berdomisili di Jayapura tergolong banyak. Demikian pula, sebagian besar tidak mempersoalkan etnisitas kepala daerah mereka.

Heterogenitas masyarakat di Jayapura melahirkan pula beragam kearifan lokal. Setiap daerah membawa masing-masing kebudayaan mereka, dan melaksanakan tradisi tersebut di Jayapura. Bagi generasi muda Jayapura, mereka sama sekali tidak merasa terganggu dengan keberagaman tradisi lokal dari luar Papua. Beragam tradisi lokal itu dimaknai sebagai kekayaan kebudayaan Indonesia yang mesti terus dilestarikan. Beragam kebudayaan itu ikut mempertegas, bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Stefanus, mahasiswa semester tiga Universitas Cenderawasih, menyatakan, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai pemersatu. Se jauh ini, Papua dikenal

dengan beragam tradisi dan ritual adatnya. Di antara tradisi dan ritual tersebut ada yang masih dipraktikkan oleh pelaku pendukung kebudayaan (masyarakatnya). Misalkan, *bakar batu*.

Ritual *bakar batu* merupakan representasi pengelolaan solidaritas untuk mencari kesepakatan dan keadilan dari kelompok yang tengah bertikai. Ritual *bakar batu* juga dipandang sebagai media untuk membangun toleransi perdamaian, media resolusi konflik, dan membangun kesepakatan-kesepakatan kultural agar perdamaian di antara kelompok yang bertikai dapat segera diselesaikan

Upacara *bakar batu* digelar selama lima hari. Pada hari yang ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, para anggota suku yang bersengketa kemudian berkumpul, dan membuat perapian dari bahan batu-batuan dan ranting-ranting kering. Para wanita memasak sayuran dan ubi-ubian di atas perapian tersebut. Setelah matang, semua anggota suku yang hadir menyantap masakan yang telah tersaji. Dengan keberagaman etnisitas dan agama di Papua (termasuk Jayapura), ritual *bakar batu* di beberapa daerah mengalami transformasi dan dikontekstualkan sesuai kondisi sekarang, terutama hidangan yang disajikan. Jika selama ini kerap disajikan daging babi, kini daging babi sudah bisa diganti dengan daging ayam. Ini juga untuk mengakomodir orang Muslim yang ikut upacara ini (Tukan, 2014, dalam Asyhari dan Afwan, 2015:66-67).

Kearifan lokal lain yang dianggap bisa menyelesaikan pertikaian adalah *makan pinang*. Berbeda dengan *bakar batu* yang disertai dengan upacara dan sakral, *makan pinang* biasanya dilakukan sambil duduk-duduk di satu tempat, dan terkesan lebih santai. Bila ada individu atau kelompok

bertikai, biasanya ada tokoh adat atau orang yang dihormati memediasi pertemuan di suatu tempat. Dalam pertemuan tersebut selalu tersedia buah pinang yang ditaruh di dalam satu wadah. Semua yang hadir bisa mengonsumsi pinang tersebut. Bagi sebagian besar orang Papua, *makan pinang* merupakan identitas Papua. Orang Papua merasa tak bisa dipisahkan dengan buah pinang, baik laki-laki maupun perempuan. Secara sosial, *makan pinang* bisa berfungsi mencairkan suasana, saling mengenal, serta mengakrabkan satu dengan yang lain (Wawancara Dosen Antropologi Uncen, Yuliana, 1 Agustus 2018).

Dalam kaitan ini, saya sependapat dengan Syamsul Ma'arif, yang menulis Kata Pengantar di buku "Mutiarra Terpendam Papua; Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua (2015)". Menurutnya, kearifan lokal dapat juga dipahami sebagai sistem budaya yang diciptakan, direproduksi, dan digunakan oleh komunitas untuk mencapai tujuan komunitasnya. Dalam konteks ini, perdamaian dan ko-eksistensi. Sebagai sistem budaya, kearifan lokal adalah instrumen untuk mengembangkan multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan, penerimaan, penghargaan, perayaan perbedaan (Ma'arif, 2015:iv-vii). Dua kearifan lokal seperti disebutkan di atas, *bakar batu* dan *makan pinang*, dianggap representatif untuk dijadikan sarana pemersatu.

## **PENUTUP**

Pengetahuan generasi muda Jayapura berkenaan konsensus bernegara (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan), dapat dikatakan bagus. Hampir semua generasi muda mengetahui tentang konsensus bernegara tersebut. Mereka juga

menghapal teks Pancasila, menghapal lagu-lagu bertema kebangsaan, dan bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Tentunya, generasi muda Jayapura tidak bisa disamakan dengan generasi muda di daerah lain, terutama kalangan pemuda yang ikut mencetuskan Kongres Sumpah Pemuda 1928, misalnya. Saat itu, generasi tua Papua memang tidak mengalami pengalaman seperti yang dirasakan pemuda dari luar Papua, disebabkan keterlambatan mengenal nasionalisme.

Untuk menggambarkan nasionalisme generasi muda Jayapura, konsep Nasionalisme Kosmopolitan dipandang tepat. Nasionalisme dalam konteks ini dipahami tidak sebagai ikatan eksklusif terhadap satu entitas negara-bangsa, melainkan sebagai bentuk nasionalisme yang membuka kemungkinan bagi waega negara untuk bertautan dengan identitas-identitas lain di luar pertautannya dengan negara bangsanya. Meskipun misalnya ada juga di antara generasi muda Jayapura belum mengakui Indonesia, atau menghendaki Papua Merdeka, mereka tetap menggunakan Indonesia sebagai penanda identitasnya. Mereka juga tetap antusias mengikat perkembangan situasi sosial dan politik Indonesia melalui internet (Nadzir, 2018:7).

Yang juga patut diberi catatan penting, nasionalisme di Jayapura tidak selamanya merujuk pada hapalan empat konsensus bernegara. Nasionalisme di Jayapura menyangkut juga persoalan ketimpangan kondisi sosial ekonomi (ketidakadilan, kesejahteraan masyarakat, dan diskriminatif). Karena itu, perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah setempat terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Papua, menjadi harapan generasi muda di Jayapura.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Tuhana Taufiq, 2001, *Mengapa Papua Bergolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Arymami, Dian. 2017. *Transaksi Seks di Era Media Baru*. Yogyakarta:Jalasutra.
- Asyhari dan Afwan, 2015, *Mutiara Terpendam Papua, Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- BPS Kota Jayapura 2016.
- Dewi, Ana Riwayati, 2017, *Pemikiran Gus Dur tentang Nasionalisme dan Multikulturalisme (1963-2001)*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Meteray, Bernarda, 2014, *Kontestasi Nasionalisme Papua Dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru*, Seminar Akhir Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik” Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik Dengan Jaringan Damai Papua (JDP), 281–86. Jakarta: LIPI.
- Munir, Rozy, 2011, “Migrasi”, Ed. Sri Moertiningsih Adioetomo & Omas Bilan Samosir “Dasar-dasar Demografi”, Depok, Salemba Empat Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nadzir, Ibnu, 2018, *Milenial dan Nasionalisme di Indonesia*, Makalah, Disampaikan pada Refleksi 90 Tahun Sumpah Pemuda Dialog Kebangsaan “Nasionalisme Ala Milenial” yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kemasyarakatan & Kebudayaan LIPI, 31 Oktober 2018.
- Noor, F, 2013, *Negara dan Kedaulatan Politik*, dalam Noveria (ed.), “Kedaulatan Negara di Wilayah Perbatasan: Tinjauan Multidimensi”, PPK-LIPI, Jakarta.
- Pamungkas, Cahyo, 2015, *Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 41, Nomor 2, Desember 2015.
- Putra, Yanuar Surya, 2016, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, dalam Jurnal *Among Makarti* Volume 9. Nomor 18, Desember 2016.
- Syuhudi, Muhammad Irfan, 2018, *Integritas Kebangsaan Generasi Muda di Kota Jayapura*, Laporan Penelitian, Balai Litbang Agama Makassar: Makassar.
- Syuhudi, Muhammad Irfan, 2019, *Tubuhku Milikmu: Imajinasi Seksualitas pada Tubuh Artis*, dalam Jurnal *Mimikri*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019.
- Widjojo, S. Muridan, 2009, *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*, Jakarta: Tifa Foundation.
- Widjojo, S. Muridan, 2012, *Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era Otsus Papua*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 38, Nomor 2, Desember 2012.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1078937/joko-wi-pembangunan-infrastruktur-buka-isolasi-papua/full&Paging=Otomatis>, diakses pada 23 Agustus 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta>, diakses pada 23 Agustus 2018).
- <http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/3/2010/millennials-confident-connected-open-to-change.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2019).
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta>, diakses pada 23 Agustus 2018).